

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Muna)**

Hanalir¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Nasrullah Dali²⁾ dan Husin²⁾

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD kabupaten Muna. Pendekatan penelitian ini adalah metode *survey* dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 SKPD Kabupaten Muna diluar Kecamatan, dengan jumlah sampel 142 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode total *sampling*, metode sampling jenuh atau sensus dimana seluruh populasi sampel di jadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan.*

1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas publik merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan karena adanya hak publik untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terhadap pemakai. Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur pembentuk laporan yang bernilai menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat di bandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pengelolaan keuangan daerah, terutama mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dapat dikatakan bernilai apabila dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan pemerintah yang informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban.

Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang pembuatannya tepat waktu dan benar, oleh karena itu dalam pembuatan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang telah memahami sistem akuntansi pemerintah, organisasi pemerintahan dan keuangan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian (Sudiaranti, 2015) mengaitkan kompetensi sumber daya dan kualitas laporan keuangan menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sub bagian akuntansi maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan semakin baik. Lebih lanjut (Evicahyani, 2015) juga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Hasil ini pula menunjukkan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan (Kalumata, 2016) menyatakan hal yang berbeda, bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian berarti tidak ada

pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian (Santoso, 2016) menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung . Artinya, semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manaf, 2014), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Selain kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern, Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Kalumata, 2016) menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan, memberikan bukti bahwa teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Hal serupa dilakukan oleh (Santoso, 2016) menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi sehingga mendukung kualitas LKPD yang relevan dan andal. Sementara (Puspitawati, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Lampung. Dengan demikian berarti tidak ada pengaruh antara pemanfaatan teknologi dan kualitas laporan keuangan.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Winidyaningrum (2009); Manaf (2014); Sudiaranti (2015); Evicahyani (2015); Kalumata (2016); Santoso (2016) dan Puspitawati (2016). Penelitian tersebut menguji secara empiris variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kabupaten Muna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini memiliki prestasi yang kurang baik dalam pengelolaan laporan keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011 - 2015 masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk lebih jelasnya opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Muna disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Opini Audit Kabupaten Muna Tahun 2011-2015

Tahun	Opini Audit Kabupaten Muna
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : IHPS Semester II Tahun 2016 BPK RI

Kabupaten Muna masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan Inspektur Kabupaten/Kota yaitu, hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tahun anggaran 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Muna, masih menunjukkan beberapa kelemahan antara lain: (1) Aset tetap tidak diketahui keberadaannya yaitu kendaraan roda dua dan roda empat, alat-alat pertanian, dan alat angkat terapung tidak diketahui keberadaannya senilai Rp. 44,50 miliar; dan (2) Aset dikuasai oleh pihak lain senilai Rp. 11, 79 miliar, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit rumah dinas guru yang dikuasai oleh pensiunan dan/atau keluarga pensiunan; kendaraan roda dua dan roda empat, alat-alat pertanian, dan alat angkat terapung dalam penguasaan pihak lain tanpa persetujuan dari SKPD; serta tanah dan bangunan dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah, diantaranya telah didirikan bangunan dan renovasi (IHPS II BPK RI, 2016). Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai aset tetap yang dilaporkan pemerintah daerah tidak akurat, hilangnya potensi penerimaan atas pemanfaatan aset tetap yang tidak didukung dengan perjanjian kontrak/sewa, dan risiko terjadinya permasalahan hukum dan kehilangan atas aset tetap tanah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dikuasai pihak lain, serta belum dilakukan pengamanan fisik aset tetap secara memadai (IHPS II BPK RI, 2016).

Beberapa fenomena yang telah disebutkan sebelumnya membuktikan bahwa masih lemahnya kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah selama ini yang merugikan pemerintah daerah, faktor pemanfaatan teknologi informasi yang kurang baik dalam pencatatan laporan keuangan berkemungkinan juga ikut mempengaruhi hasil laporan keuangan pemerintah yang diharapkan berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna. Jika dilihat dari opini audit, status wajar dengan pengecualian belum menjadi yang terbaik, dan masih perlu ditingkatkan oleh pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas sebagai elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan juga mempengaruhi hasil opini laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK nantinya.

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini ingin menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Berdasarkan konsep teoritis dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Muna).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling. Jensen dan Meckling (1976: 308) menyatakan bahwa: *"We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal."*

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*. Agen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh *principal* kepadanya. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semakin menguatnya tuntutan terhadap lembaga-lembaga publik untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam PSAK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa: "Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Rugi-Laba, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut (2001: 133) dengan membaginya menjadi dua antara lain:

1. Tujuan umum, menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima.
2. Tujuan khusus, memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsure-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset non lancar, serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari jangka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dasar (*basic research*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis (Sugiyono, 2013:4).

Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Muna.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) sebagai variabel independen serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Y) sebagai variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:72). Populasi dalam penelitian ini adalah mengfokuskan Subjek penelitian hanya terbatas pada Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan (kasubag keuangan dan staf keuangan) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabupaten Muna per Februari 2017 sebanyak 6.182 orang, yang tersebar di seluruh SKPD Kabupaten Muna. Jumlah SKPD di Kabupaten Muna sebanyak 32 (tiga puluh dua) sesuai dengan Daftar nama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada tabel 4.1, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 142 responden.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *total sampling*. Metode sampling jenuh atau

sensus menurut Sugiyono (2013:117) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kadis/Kabupaten, Sekertaris, Bendahara, Kasubag keuangan dan staf bagian penatausahaan/pengelola keuangan pada setiap SKPD, dengan total responden 142 orang. Alasan pemilihan responden adalah karena Kadis/Kabupaten, sekertaris, bendahara dan kasubag keuangan berwenang dalam mengambil keputusan terkait laporan keuangan dan staf bagian penatausahaan/pengelola keuangan sebagai elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan, karena terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan sangat memahami kegiatan pemrosesan laporan keuangan.

Tabel 3.1. Daftar SKPD dan Jumlah Responden

No	Nama SKPD	Jumlah Responden
1.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5
2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4
5.	Sekretariat Daerah	4
6.	Sekretariat DPRD	3
7.	Inspektorat	4
8.	Dinas Ketahanan Pangan	4
9.	Dinas Perhubungan	4
10.	Badan Pendapatan Daerah	6
11.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	4
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
13.	Dinas Koperasi	4
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	4
15.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4
17.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4
18.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
21.	Dinas Pariwisata	4
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4
23.	Dinas Lingkungan Hidup	4
24.	Dinas Perikanan	4
25.	Dinas Kesehatan	4
26.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
28.	Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian	4
29.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4
30.	Dinas Sosial	4
31.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
32.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
Total		142

4. Hasil

Uji Hipotesis

Hasil Uji secara parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual mampu menjelaskan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan kriteria pengujian jika nilai sig. $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	rbeta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	1,014	,335		3,030	,003					
Kompetensi	,205	,070	,236	2,913	,004	,485	,241	,196	,684	1,461
SPI	,324	,096	,266	3,384	,001	,478	,277	,227	,728	1,373
TI	,200	,051	,291	3,935	,000	,468	,318	,264	,826	1,211

a. Dependent Variable: KLIK

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)

Berdasarkan hasil analisis regresi pertama yaitu variabel Kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y), variabel kompetensi sumber daya manusia dengan signifikan t sebesar $0,004 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan demikian H_1 diterima.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (X_2)

Berdasarkan hasil analisis regresi kedua yaitu variabel penerapan sistem pengendalian intern (X_2) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) variabel penerapan sistem pengendalian intern dengan signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan demikian H_2 diterima.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)

Berdasarkan hasil analisis regresi ketiga yaitu variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y), variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan demikian H_3 diterima.

Hasil Uji secara simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009:88). Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan kriteria pengujiannya yakni jika nilai sig. $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji secara simultan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji secara simultan (Uji F)
ANOVA^a

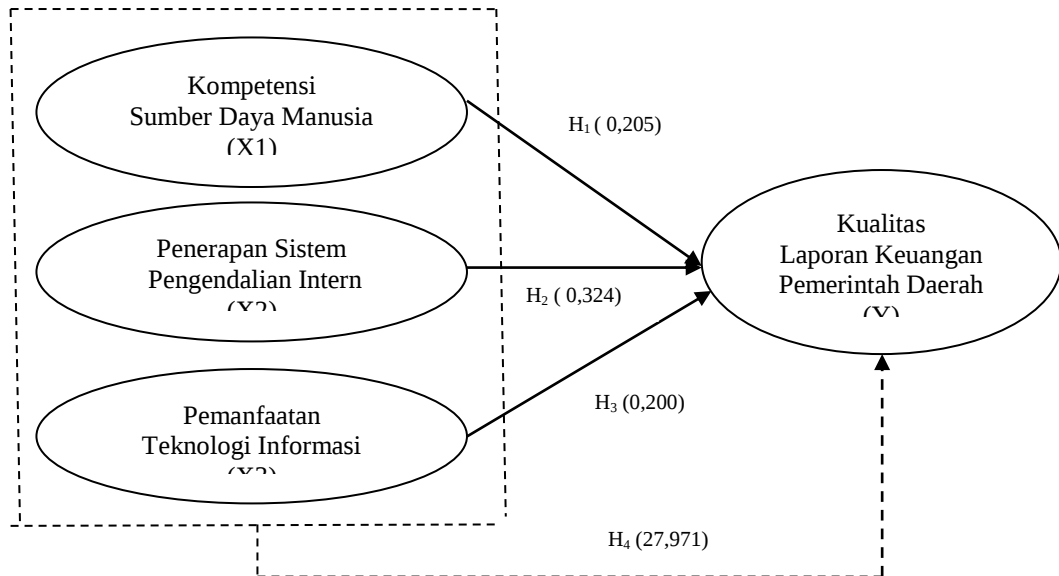
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8,830	3	2,943	27,971	,000 ^b
Residual	14,522	138	,105		
Total	23,353	141			

a. Dependent Variable: KLIK

a. Predictors: (Constant), TI, SPI, Kompetensi

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5.17 hasil uji F = 27,971 dengan nilai signifikan = 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1), penerapan sistem pengendalian intern (X_2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_3) secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Y).



Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Fakta empiris dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan t (t -sig) sebesar $0,004 < 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dapat diterima. Dalam suatu organisasi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting, karena yang menjalankan serta mengelola suatu organisasi adalah sumber daya manusianya. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya. Sama halnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya yang kompeten.

Peneliti yang meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, diantaranya Sudiarianti (2015) dan Evicahyani (2015), yang mengemukakan terdapat hubungan positif signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan Kalumata (2016) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Fakta empiris dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan t (t -sig) sebesar $0,001 < 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dapat diterima.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintah negara/daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik sehingga akan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Peneliti yang meneliti pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya Kalumata (2016), Santoso (2016), dan Puspitawati (2016) dari hasil penelitiannya menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Manaf (2014), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Fakta empiris dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan t (t -sig) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dapat diterima.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Afrianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Beberapa peneliti yang meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya Kalumata (2016) dan Santoso (2016) dari hasil penelitiannya menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Puspitawati (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga (H_4) menyatakan Pengaruh pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Fakta empiris dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah t (t-sig) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dapat diterima.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting di dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah daerah sangat membutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi dan keunggulan individu didalam melaksanakan tugas berdasarkan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Kompetensi SDM sangat penting didalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal ini mendukung penelitian Santoso (2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi pada instansi pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang dalam proses pengolahan data, pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara komputerisasi sehingga dapat menghasilkan kualitas LKPD. Kalumata (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa Teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berarti bahwa Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, implikasi dari penelitian ini adalah:

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk SKPD Kabupaten Muna dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dengan materi yang mudah dipahami, agar pemerintah selalu melakukan penguatan efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pelatihan aplikasi, jaringan internet, meningkatkan pemantauan pengendalian intern. Sehingga kualitas laporan keuangan dapat memenuhi syarat normatif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki keterbatasan penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini tidak mencakup kecamatan yang ada di Kabupaten Muna karena kesulitan dalam mengumpulkan data yang memerlukan waktu yang lama karena terkendala jarak yang jauh.

2. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara. Ada baiknya pengumpulan data dilengkapi dengan daftar pertanyaan lisan melalui wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, D. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*. BPK RI. Jakarta
- Evicahyani, Sagung Inten. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*. Jurnal Tesis Magister Akuntansi. Universitas Udayana. Denpasar.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit-UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit-UNDIP. Semarang.
- Griffin. 2004. *Manajemen*. Alih Bahasa Gina Gania. Jakarta: Erlangga.
- Harnoni. 2016. *Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FEKON UNRI Vol. 3 No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan per Efektif 1 Januari 2015*. Jakarta.
- Jensen, M. and Mecking, W. 1976. *Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Stucture*. Journal of Financial Economics 3 (4).
- Jonas, G. dan Blanchet, J. 2000. *Assessing Quality of Financial Reporting*. Accounting Horizons, 14 (3), 353-363.
- Kalumata, Merlyn. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal
- Manaf, Iqlima. 2014. *Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164, pp. 23- 35.

- Matindas, R. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha*. Edisi II. Penerbit Grafiti: Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna*.
- Puspitawati, Desi. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Santoso, Puji. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung*. Jurnal Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sofyan Syafri Harahap. 2001. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Spencer, L.M. dan Spencer, S.M. 1993. *Competence Work: Model for Superior Performance*. John Wiley and Sons. Inc.
- Sudiarianti, Ni Made. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Tesis Magister Akuntansi. Universitas Udayana. Denpasar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suyanto. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

The Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission, COSO (1992): *COSO – Internal Control Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission.*

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.

Winidyaningrum, Celviana. 2009. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten),* Simposium Nasional Akuntansi XIII. 13-14 Oktober. Purwokerto.